



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 239 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail: diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
NOMOR 002/PPID/III TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bupati perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 001/BA-PPID/III/2018 tentang Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dirujuk oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
KARANGANYAR SELAKU
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA



AGUNG TJANJO NUGROHO

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar
2. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar;
3. Kepala PD se-Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 002/PPID/III TAHUN 2018
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KARANGANYAR

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	BAGIAN PEMERINTAHAN	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota / Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.	UU 32 tahun 2004, PP 16 Tahun 2010, UU no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Akan menghambat kesuksesan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan pemerintahan kab/kota
		Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/Appraisal untuk pengadaan tanah	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengganggu keberhasilan proses negoisasi yang akan atau sedang dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepastian dalam penetapan harga - Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah

1	2	3	4	5	6	7
		Pertimbangan Teknis tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i - Permenhut Nomor : P.43/ Menhut-Ii/ 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan - Kepmenhut No. 292/Kpts-II/1995 ttg Tukar menukar kawasan hutan 	Menggangu keberhasilan proses negoisasi yang akan atau sedang dilakukan.	Kelancaran proses tukar menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan	Kepala Biro Tata Pemerintahan
2	BAGIAN PEMERINTAH DESA	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i angka 2	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Kelancaran pelaksanaan pembangunan.
		Barita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah) Prov. Jateng	PP No 40 Tahun 1996 ttg HGU, HGB dan HP atas Tanah	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas alas hak atas tanah
		Kajian teknis penetapan Lokasi dan Basic Design pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Menimbulkan spekulasi tanah 	Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah

1	2	3	4	5	6	7
3	BAGIAN HUKUM	Penetapan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersifat rahasia.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan batas waktu Keputusan tersebut dicabut.	Dapat mengungkap rahasia pribadi/Negara dan dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Melindungi rahasia pribadi/Negara, serta memperlancar proses penyusunan kebijakan.
		Penetapan Keputusan Bupati yang bersifat perizinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan batas waktu izin tersebut belaku.	Berkaitan dengan perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.	Melindungi rahasia perusahaan, sehingga dapat berkembang dengan baik.
		Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan mutasi/pengangkatan/pe mberhentian/penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan diumumkannya Keputusan tersebut oleh Pejabat yang berwenang.	Dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan bagian dari rahasia jabatan.	Menjaga kondusifitas dan intervensi dalam pengambilan keputusan.
		Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan pembentukan Tim dan sejenisnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Keputusan tersebut boleh diminta oleh pihak lain yang berkaitan langsung dengan penetapan Keputusan.	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Melindungi proses penyusunan kebijakan.

1	2	3	4	5	6	7
		Berkas perkara PTUN dan perkara Perdata sebelum disampaikan di persidangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan keputusan inkrahct / mempunyai kekuatan hukum tetap.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Memperlancar proses penegakan hukum.
4	BAGIAN PEREKONOMIAN	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.40 Th. 2007 ttg Perseroan Terbatas pasal 63 s.d 65 - UU 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf i 	Terbatas, sampai dengan adanya laporan publikasi pada tahun berikutnya	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur; persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur; pencapaian bisnis plan secara optimal
		Hasil RUPS BUMD	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.40 Th. 2007 ttg Perseroan Terbatas pasal 75 s.d.91 - UU 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur; persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur; pencapaian bisnis plan secara optimal
		Data nasabah penyimpan dan simpanannya; laporan pemeriksaan bank	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Th. 1998 Pasal 33, 40 - UU 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf e 	Tidak Terbatas, kecuali mendapatkan ijin sbgmn ps.41, 41A, 42, 43, 44 dan 44 A UU tsb	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek & norma kerahasiaan bank

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil audit dari akuntan publik	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Th. 1998 Pasal 33, 40 - UU 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf e 	Tidak Terbatas, kecuali mendapatkan ijin sbgmn ps.41, 41A, 42, 43, 44 dan 44 A UU tsb	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek & norma kerahasiaan bank
		Analisa dan permohonan kredit nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Th. 1998 Pasal 33, 40 - UU 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf e 	Tidak Terbatas, kecuali mendapatkan ijin sbgmn ps.41, 41A, 42, 43, 44 dan 44 A UU tsb	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek & norma kerahasiaan bank
5	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TELEKOMUNIKASI	Berita/Radiogram rahasia	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Terbatas , sampai dengan informasi diterima user	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / informasi rahasia
		Identitas Tamu VVIP di Wisma Pemda	<ul style="list-style-type: none"> - Pergub No. 105 th. 2008 - Perda No. 10 th. 2008 	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi hak pribadi tamu
6	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Berita/Radiogram rahasia	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Terbatas , sampai dengan informasi diterima user	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / informasi rahasia

1	2	3	4	5	6	7
7	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	<p>Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota / Pimpinan DPRD Kabupaten.</p> <p>Materi Rapat Paripurna yang terkait dengan public yang masih perlu disosialisasikan.</p>	<p>a) UU 32 Tahun 2014 b) PP 16 Tahun 2010 c) UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</p> <p>Keputusan DPRD No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Karanganyar No. 1 Tahun 2017</p>	<p>Sampai penerbitan keputusan.</p> <p>Setelah menjadi Ketetapan Perda atau Perbup</p>	<p>Akan menghambat kesuksesan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.</p> <p>Akan menghambat proses penyelesaian Perda atau Perbup</p>	<p>Menjaga iklim kondusif di lingkungan pemerintah kabupaten.</p> <p>Akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain karena penjelasan bukan dari ahlinya.</p>
8	INSPEKTORAT	<p>Laporan Hasil Pengawasan, terdiri dari :</p> <p>a. Laporan Hasil Pemeriksaan, b. Laporan Hasil Reviu; dan c. Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring</p>	<p>a) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; b) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p>	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

1	2	3	4	5	6	7
			<p>c) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 Ayat (2); d) Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah; e) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia : STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN No. 4060 - Pendistribusian Hasil Audit Intern;</p>			
9	BADAN KEUANGAN DAERAH	Rencana pelaksanaan tukar menukar / pemindahtanganan	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf e angka 4	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Menggangu / berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan / siklus PBD

1	2	3	4	5	6	7
		Database Obyek Pajak dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j - UU 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database Obyek pajak dan retribusi
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Data hasil check up perorangan PNS / pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Data hasil Evaluasi Kinerja PNS / pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Data hasil Tes Potensi / Kompetensi PNS / pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
		Data rencana penempatan CPNS / PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah kolusi
		Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja

1	2	3	4	5	6	7
		Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menimbulkan keresahan di kalangan Pegawai	Melindungi data pribadi
		Instrumen Tes Potensi / Kompetensi PNS/pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengurangi obyektivitas penilaian	Melindungi data pribadi
		Instrumen Penilaian Kinerja PNS/pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengurangi obyektivitas penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan	Objektivitas penilaian kinerja dengan jawaban spontan
		Soal tes CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
		Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	- Permendagri No 26 Tahun 2005 - UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 (i)	Sampai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana
		Informasi perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	Kep Men Huk Ham No 1/2003 ttg Pencabutan Permendagri No.4 Tahun 2007 ttg PPNS di Ling Pemda	Tidak terbatas	Penyidikan akan terpengaruh dengan provokasi	Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku

1	2	3	4	5	6	7
		Informasi hasil penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggaran Perda Prov. Jateng	<ul style="list-style-type: none"> - PP 32 Tahun 2004 PP 6 Tahun 2010 - UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 a (1) 	Sampai selesainya kasus	Menggagalkan rencana operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan
		Informasi data pribadi personil penegak Perda	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 buruf a Nomor 4	Tidak terbatas	Membahayakan keselamatan petugas penegak Perda dari ancaman/dendam subyek pelanggaran Perda	Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran Perda
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll	Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem	Terbatas, sesuai tahun berjalan	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara
		Proses Scanning/Scoring UN/UNPK/UASBN		Terbatas, sesuai tahun berjalan	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara
		Proses Rekrutmen Siswa Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan dan Pemilihan Paskibra (SP-3).	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 3 Tahun 2005 Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) - UU No. 40 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (3) 	Sampai dengan dilaksanakannya seleksi.	Menghindari ketidak-obyektifan seleksi	Kelancaran Pelaksanaan Seleksi PPLP, PPAN ,SP-3
		Hasil test kemampuan fisik	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Sampai ada Hasil test kemampuan Fisik	Menghindari rekrutmen yang kurang kompetitif	Meningkatkan prestasi atlet daerah
		Hasil <i>Research and Development</i> di bidang IPTEK Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 3 Tahun 2005 Pasal 20 ayat, - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 	Sampai diperolehnya sertifikat HAKI	Terjadinya penggunaan hasil Iptek Olah Raga oleh pihak lain	Melindungi hasil Iptek Olah Raga

1	2	3	4	5	6	7
13	DINAS KESEHATAN	Penderita HIV / AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan WHO - Permenko Kesra II/2009 - Perda no 5 / 2009 	Tidak terbatas	Bertentangan dg kesepakatan internasional	Melindungi HAM dan menghindari dari stigma dan diskriminasi
		Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 57 ayat 1 - UU No. 29 Tahun 2004 ttg Praktek Kedokteran, pasal 47 ayat 2 	Atas perintah hakim / pengadilan	Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
		Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien	UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 57 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
		Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan.	UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 44 ayat 3	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subyek penelitian
		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis.	Permenkes 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
		Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
		Hasil audit terkait dengan medical error.	Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien

1	2	3	4	5	6	7
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h. - UU no 4 th. 2009 pasal 88. 	Terbatas sampai proses evaluasi selesai	Terhambatnya proses evaluasi dan pengawasan kegiatan pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi); - Menghindari persaingan tidak sehat
		Data teknis potensi airtanah	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d. - PP no 43 th. 2008 tentang airtanah pasal 23 ayat (3). 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.
		Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf d. - UU no 4 th. 2009 pasal 88. 	Tidak terbatas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.
		Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 27 tahun 2003 Tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3). - UU no 14 th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d. 	Tidak terbatas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.

1	2	3	4	5	6	7
		Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 27 tahun 2003 Tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3). - UU no 14 th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d. 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka rahasia perusahaan; - Timbulnya persaingan tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi); - Menghindari persaingan tidak sehat.
		Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h. - UU no 4 th. 2009 pasal 88. 	Terbatas sampai proses evaluasi selesai	Terhambatnya proses evaluasi dan pengawasan kegiatan pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi); - Menghindari persaingan tidak sehat
		Data teknis potensi airtanah	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d. - PP no 43 th. 2008 tentang airtanah pasal 23 ayat (3). 	Tidak Terbatas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.
15	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Daftar pembeli (Buyer) yang sudah di miliki oleh pengusaha (eksportir) tertentu.	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif.

1	2	3	4	5	6	7
		Surat Pengajuan Hak Merek, cipta, paten, desain yang masih dalam proses di DEPKUMHAM.	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
		Data debitur dana bergulir.	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi debitur dari kelangsungan usahanya
		Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah) dan UDKM (Usaha Dagang Kecil Menengah)	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
		Surat Keterangan Asal (SKA) barang, Penerbitan SPEK (Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Data jaringan bisnis perusahaan	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Data stock gula kristal putih	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Dapat menimbulkan gejolak harga	Menjaga iklim usaha kondusif
		Hasil Uji Laboratorium Untuk Keperluan Ekspor	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu

1	2	3	4	5	6	7
		Biodata Individu dan data Keluarga : a. Kependudukan b. Ketenagakerjaan c. Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Th. 2006 tentang Kependudukan - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j 	Tidak terbatas	Mengungkap Rahasia Pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi setiap warga Negara Indonesia dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
		Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j 	Sampai Upah Minimum ditetapkan Gubernur	Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga Iklim Kondusif
		Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dari dunia Usaha kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan huruf j 	Sampai terbit surat penangguhan Upah Minimum	Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Menjaga Iklim Kondusif
		Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	UU No. 3 Th. 1951	Tidak Terbatas	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia Pengusaha	Melindungi hak pribadi Pengusaha
		Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada Perusahaan di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Th. 2006 tentang Kependudukan - UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j 	Tidak Terbatas	Mengungkap Rahasia Pribadi yang bersifat rahasia.	Kepastian perlindungan terhadap TKA

1	2	3	4	5	6	7
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Identitas Korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu BP3AKB Prov. Jateng.	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak pribadi
		Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan.	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 2	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Ps 17 huruf a, - UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
		Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a, - UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum

1	2	3	4	5	6	7
		Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa).	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum
		Rencana Detail Hasil AMDAL bidang pertahanan keamanan	UU No 14 tahun 2008 Ps 17 huruf c	Tidak terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara/ daerah	Melindungi ketahanan dan keamanan negara
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Dokumen sisi mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b, - PP No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten 	Tidak Terbatas	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu.	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi.
		Hasil Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b, - PP. No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Wajib 	Sampai dengan ada keputusan resmi	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu.	Melindungi dan Mengamankan hasil informasi yang diperoleh
		Hasil Uji Mutu Pangan di Produsen	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b, 	Sampai dengan ada keputusan resmi	Menimbulkan Keresahan di Masyarakat	Melindungi ketentraman masyarakat

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, - UU Pangan No. 71 Tahun 1996, - UU No. 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Pelabelan 			
		Peta batas kawasan hutan digital	UU No.14 tahun 2008 psl 17 huruf d	Tidak terbatas	Rusaknya koordinat batas kawasan hutan Negara	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan Negara.
		Rencana pemanfaatan/pengelolaan kawasan hutan dan hasil hutan	UU No. 41 tahun 1990 tentang Kehutanan	Tidak terbatas	Mengungkapkan kekayaan alam daerah	Mengamankan data
		Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan / ilegal logging / ilegal trading yang masih dalam proses	UU No. 41 tahun 1990 tentang Kehutanan	Sampai dengan proses P21	Mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar
		Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	Setelah dinyatakan untuk publik	Terjadi eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak	Terjaganya sumberdaya plasma nuftah
		Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal	PP No 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman Pasal 41 (1)	Terbatas sampai selesainya proses pengusutan	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Mengamankan proses penegakan hukum

1	2	3	4	5	6	7
		Proses penyelesaian pengusutan peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 37 (3) Pasal 38,39 dan 41 Pasal 60 Ayat (1) huruf f dan g - UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 a	Terbatas sampai selesainya proses Pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi dan mengamankan Petugas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
		Proses Penyelesaian sengketa Perusahaan Perkebunan Besar Negara/ Swasta	- UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 21 Pasal 47 ayat (1) - UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 (a) - UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 12	Terbatas sampai selesainya sengketa	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Mengamankan proses penegakan hukum
		Proses usulan penilaian Usaha Perkebunan Negara/ Swasta	- UU No 12 th 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 13 ayat (2),	Terbatas sampai dengan 6 bulan dari sejak proses pengusulan		Mengamankan hak pribadi/ Perusahaan

1	2	3	4	5	6	7
			Pasal 14, Pasal 17 Ayat 2, Pasal 60 (c, d) - UU No 12 th 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 Ayat 2, Pasal 60 (c, d) - UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17a			
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Data pribadi penduduk / data perseorangan dan dokumen kependudukan	UU 24 Tahun 2013 Pasal 79 angka 1, Pasal 84 angka 1 dan 2	Tidak terbatas	Menimbulkan permasalahan hukum karena data-data tersebut wajib disimpan dan dilindungi keabsahannya oleh negara	Data pribadi seseorang terlindungi, terjaga keabsahannya dan hanya boleh diakses oleh lembaga-lembaga pengguna dengan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan ruang lingkup data yang diperlukan.
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) dan program bantuan kepada pemerintah desa/kel dan kelompok masyarakat	UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 2	Sampai adanya petunjuk/rekomendasi Gubernur	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Asas Praduga tak Bersalah)	Melindungi hak privasi

1	2	3	4	5	6	7
		Proses Penempatan / relokasi/fasilitator PNPM-MP	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan friksi antar fasilitator dan kolusi	Terhindarnya friksi antar fasilitator dan kolusi
		Proses Penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Terhindarnya friksi antar nominator dan kolusi.
		Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kel dan kepada kelompok masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h. - UU no 4 th. 2009 pasal 88. 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka rahasia perusahaan; - Menimbulkan persaingan tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) - Menghindari persaingan tidak sehat.
		Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan kuantitas komoditas tambang)	UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf d dan h.	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap-kan kekayaan alam Indonesia; - Membuka rahasia perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan/ managemen Potensi Sumber Daya Alam; - Hak kepemilikan hasil Eksplorasi detail.
		Laporan Studi Kelayakan/ FS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan tambang, sebaran)	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h. - UU no 4 th. 2009 pasal 88. 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka rahasia perusahaan; - Menimbulkan persaingan tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi); - Menghindari persaingan tidak sehat.

1	2	3	4	5	6	7
22	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	Posisi Data BMKT Benda Cagar Budaya	UU No.5 Tahun 1992	Tidak terbatas	Menimbulkan Keresahan di Masyarakat	Menjaga agar tidak disalahgunakan.
23	DINAS SOSIAL	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu proses pelayanan terhadap kelayan)	Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan
		Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga menggangu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi hak pribadi kelayan
		Identitas Korban Tindak Kekerasan	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menimbulkan gangguan traumatis kelayan terutama bagi korban tindak kekerasan seksual dan pembunuhan)	Membantu mempercepat proses rehabilitasi sosial kelayan
		Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 2	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin keamanan jalur komunikasi
		Data berkas permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	UU No.14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	Menggangu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual.

1	2	3	4	5	6	7
					dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	
		Nilai Hasil Evaluasi Dengar Pendapat atau Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran	UU No.14 tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Menjamin kelancaran proses perijinan lembaga penyiaran
		Hasil Pemantauan Isi Siaran	UU No.14 tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Terbatas sampai dengan pleno komisioner	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas iklim penyiaran
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j - UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
		Arsip Peta Foto Udara	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j - UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 	Tidak terbatas	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara Indonesia.	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

1	2	3	4	5	6	7
		Arsip Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j - UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 	Tidak terbatas	Menimbulkan potensi konflik antar daerah	Mencegah konflik antar daerah
		Data Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j - UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j - UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 	Tidak terbatas	Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan Lokasi terjaga
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu ketentraman masyarakat	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf c- UU No. 3 tahun 2002	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan keresahan di masyarakat. - Mengganggu kelancaran penanganan kasus 	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah

1	2	3	4	5	6	7
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j, - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47, - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 12 dan 13, 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang
		Data hutang pasien kepada RS	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3	Tak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA



AGUNG TJAHJO NUGROHO